

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA   KERJA   KECAMATAN  
AMPELGADING KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2021

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN AMPELGADING  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Rencana Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan setelah adanya Berita Phonogram dari Bupati Malang tanggal 5 Desember 2019 Nomor: 005/1020/35.07.032/2019 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019, bertempat di Syariah Radho Hotel, beralamat di Jalan Raya Sengkaling Nomor 137, Dau, Malang, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2019 dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/2129/KEP/35.07.02/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021. Tim menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja

pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, Rencana Kerja dan Pendanaan indikatif. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Malang tanggal 31 Januari 2020 Nomor: 050/741/35.07.202/2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 April 2020 Nomor: 050/2603/35.07.202/2020 perihal Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, Tim menyempurnakan Rancangan Awal menjadi Rancangan Rencana Kerja. Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan telah diinput pada aplikasi e-RENJA (<http://e-planning.malangkab.go.id/erenja/>) yang dibuka pada tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020. Selanjutnya berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Mei 2020 Nomor: 005/3002/35.06.032/2020 Perihal Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, Tim menajamkan hasil penyelarasan Rancangan Rencana Kerja dengan hasil Musrenbang RKPD, penyelarasan tugas dan fungsi serta penyesuaian pagu indikatif Perangkat Daerah pada matrik rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 aplikasi e-RENJA (<http://e-planning.malangkab.go.id/erenja/>) yang dibuka pada tanggal 6 sampai dengan 12 Mei 2020, kemudian disusun menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja.

Dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 juga berpedoman pada Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Ampelgading Tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis. Hasil perumusan Rancangan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja

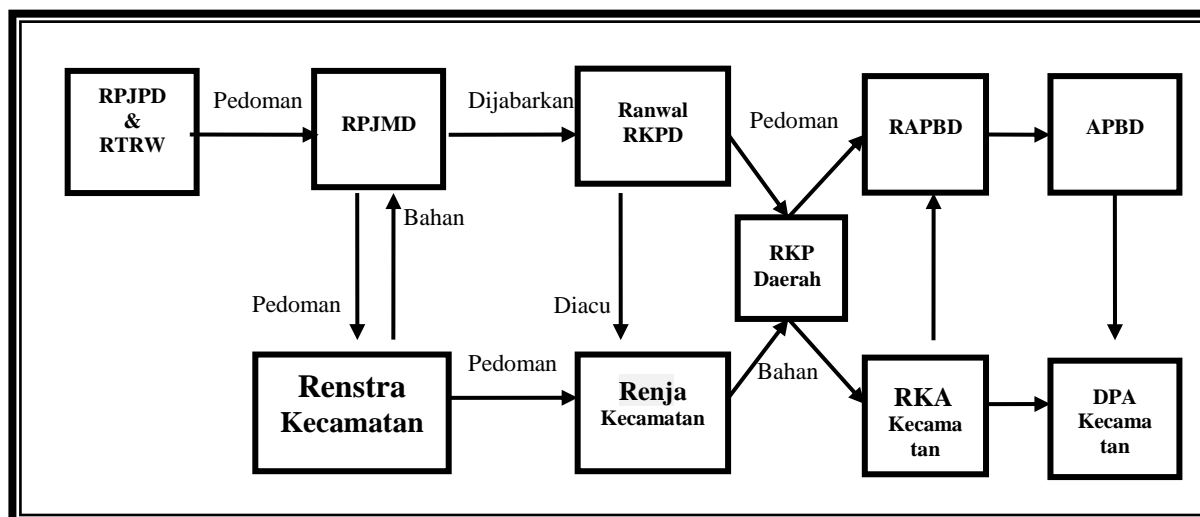
tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah serta penutup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021. Kecamatan Ampelgading selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ampelgading. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Ampelgading berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”.

Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ampelgading Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan

program dan kegiatan selama Tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ampelgading untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor     );
  15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor     );
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor Seri );
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor Seri );
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor Seri );
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/776/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/601/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/2129/KEP/35.07.02/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategi Kecamatan Ampelgading
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ampelgading

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Ampelgading**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 program dan 25 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2019 dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 99,03%.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Ampelgading untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga mengalami faktor penghambat yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
  - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
  - 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Sedangkan faktor pendukung yang mendukung kelancaran di Kecamatan Ampelgading, antara lain:

- 1) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- 2) Adanya Komitmen Bupati dalam peningkatan prasarana wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik;
- 3) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 24 (dua Puluh empat) kegiatan dan ada 1 (satu) Kegiatan yang tercapai 85,71 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 93,8%.

Tahun 2020 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 program dan 25 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2020 diperkirakan dapat terealisasi rata-rata 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020**  
**Kecamatan Ampelgading**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 7/6	(9)	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	<b>Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya</b>									
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	20 kali	8 kali	6 kali	6 kali	100	3 kali	17 kali	85
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	60 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	12 kegiatan	48 kegiatan	80
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	60 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	12 kegiatan	48 kegiatan	80
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	4 kegiatan	80
		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	60 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	12 kegiatan	48 kegiatan	80
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	60 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	12 kegiatan	48 kegiatan	80
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	44 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100	11 jenis	33 jenis	75

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 7/6	(9)	10 = 5+7+9	11 = 10/4
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5000 buah	2000 buah	1000 buah	1000 buah	100	1000 buah	4000 buah	80
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80
8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	432 ob	180 ob	84 ob	84 ob	100	84 ob	348 ob	80
9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 ob	24 ob	12 ob	12 ob	100	12 ob	48 ob	80
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	315 jenis	126 jenis	63 jenis	63 jenis	100	63 jenis	252 jenis	80
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	10 jenis	4 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	8 jenis	80
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	4 jenis	80
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	16750 kotak	6700 kotak	3350 kotak	3350 kotak	100	3350 kotak	13400 kotak	80
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	50 hok	20 hok	24 hok	24 hok	100	12 hok	44 hok	88
15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2500 hok	1000 hok	500 hok	500 hok	100	500 hok	2000 hok	80
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>69%</b>	<b>86,25</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 7/6	(9)	10 = 5+7+9	11 = 10/4
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	80
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	80
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit	80
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	80
20	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	28 jenis	0 jenis	7 jenis	6 jenis	85,71	7 jenis	7 jenis	80
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	68 stel	17 stel	17 stel	17 stel	100	17 stel	41 stel	80
22	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	68 stel	17 stel	17 stel	17 stel	100	17 stel	41 stel	80
V	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	35 dok	14 dok	7 dok	7 dok	100	7 dok	28 dok	80
24	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 lap	4 lap	2 lap	2 lap	100	2 lap	8 lap	80
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 lap	2 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	4 lap	80



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 7/6	(9)	10 = 5+7+9	11 = 10/4
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase Keaktifan Siskamling</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	<b>97,5 %</b>	<b>100</b>
26	Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah kegiatan pelatihan keamanan dan kenyamanan lingkungan	8 kali	-	-	-	-	-	8 kali	100
27	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	24 kegiatan	-	-	-	-	-	24 kegiatan	100
<b>VII</b>	<b>Program penataan administrasi kependudukan</b>	<b>kelancaran proses administrasi kependudukan</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100</b>
28	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	jumlah proses pelayanan administrasi kependudukan	3400 pengajuan	-	-	-	-	-	3400 pengajuan	100
<b>VIII</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100</b>
29	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	100

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Ampelgading, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Ampelgading dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ampelgading Tahun 2020 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Ampelgading yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2019-2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ampelgading;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ampelgading dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada lampiran.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading**  
**Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-n				Realisasi Capaian Tahun ke-n		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Indikator Kinerja Utama</b>												
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ampelgading			80,50	80,54	80,7	-	81,8	81,9	82	-	
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			76,2%	79,2%	79,7%	-	77%	80%	80%	-	
<b>Indikator Kinerja Program dan Kegiatan</b>												
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b> Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	
1	<b>Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan			6 kali	6 kali	6 kali	-	6 kali	6 kali	6 kali	-	
2	<b>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa			12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	
3	<b>Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan			12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	
4	<b>Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	
	<b>Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat			12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-n				Realisasi Capaian Tahun ke-n		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b> Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses			12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	
	<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b> Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan			11 jenis	11 jenis	11 jenis	-	11 jenis	11 jenis	11 jenis	-	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b> Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	
6	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b> Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)			1000 buah	1000 buah	1000 buah	-	1000 buah	1000 buah	1200 buah	-	
7	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)			12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	
8	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b> Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			84 ob	84 ob	84 ob	-	84 ob	84 ob	84 ob	-	
9	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b> Jumlah petugas kebersihan (OB)			12 ob	12 ob	12 ob	-	12 ob	12 ob	12 ob	-	
10	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b> Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			63 jenis	63 jenis	63 jenis	-	63 jenis	63 jenis	43 jenis	-	
11	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)			2 jenis	2 jenis	2 jenis	-	2 jenis	2 jenis	2 jenis	-	
12	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b> Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)			1 jenis	1 jenis	1 jenis	-	1 jenis	1 jenis	1 jenis	-	
13	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b> Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			3350 kotak	3350 kotak	3350 kotak	-	3350 kotak	3350 kotak	3000 kotak	-	
14	<b>Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah</b> Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)			24 hok	24 hok	24 hok	-	24 hok	24 hok	24 hok	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-n				Realisasi Capaian Tahun ke-n		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	<b>Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah</b> Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			500 hok	500 hok	500 hok	-	500 hok	500 hok	500 hok	-	
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b> Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)			80%	80%	80%	-	69%	69%	69%	-	
16	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b> Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)			1 unit	1 unit	1 unit	-	1 unit	1 unit	1 unit	-	
17	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b> Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			1 unit	1 unit	1 unit	-	1 unit	1 unit	1 unit	-	
18	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b> Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)			7 unit	7 unit	7 unit	-	7 unit	7 unit	7 unit	-	
19	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</b> Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	-	
20	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b> Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)			7 jenis	7 jenis	7 jenis	-	6 jenis	7 jenis	8 jenis	-	
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b> Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
21	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b> Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)			17 stel	17 stel	17 stel	-	17 stel	17 stel	17 stel	-	
22	<b>Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu</b> Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)			17 stel	17 stel	17 stel	-	17 stel	17 stel	17 stel	-	
V	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-n				Realisasi Capaian Tahun ke-n		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)			7 dok	7 dok	7 dok	-	7 dok	7 dok	7 dok	-	
24	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran</b> Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)			2 lap	2 lap	2 lap	-	2 lap	2 lap	2 lap	-	
25	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b> Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)			1 lap	1 lap	1 lap	-	1 lap	1 lap	4 lap	-	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ampelgading**

Permasalahan yang ada Kecamatan Ampelgading dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tugas dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik yang disebabkan:

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Ampelgading secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:**

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha.

*Upaya yang akan dilakukan antara lain:*

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan melakukan koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit operasional penanggulangan bencana dan pembentukan satuan Linmas Desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha.

## **b. Bidang Pemerintahan**

### *1) Peraturan Desa, memiliki permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

*Upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain:*

Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

### *2) Alokasi Dana Desa (ADD), memiliki permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

*Upaya yang akan dilakukan antara lain:*

Mengenai redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Ampelgading tidak ada permasalahan.

### *3) Pembinaan Perangkat, memiliki permasalahan:*

a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;

b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

*Upaya yang akan dilakukan antara lain:*

a) Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat Pemerintah Desa;

b) Pengalokasian Anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;



- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Malang dan praktisi hukum.

**c. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang;
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam Karang Taruna di masing-masing wilayah.

*Upaya yang akan dilakukan antara lain:*

- 1) Meningkatkan peran institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan kesehatan oleh Dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Akan dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta Karang Taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

**d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Kurangnya sosialisasi dari *stakeholder* yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang akan dilakukan antara lain:*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan *stakeholder* atau Dinas Terkait.

**e. Bidang Pelayanan Publik**

*1) Urusan Kependudukan, memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan masyarakat desa sudah mempunyai KK sebagai dasar penerbitan surat-surat lainnya, antara lain: secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP Elektronik. Disisi lain, masih terdapat banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih dalam bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat desa yang harus melakukan cetak ulang Surat Keterangan setiap 6 bulan sekali untuk memperpanjang masa berlaku.

2) *Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Ampelgading dalam pelayanan publik, antara lain:*

- a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b) Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

*Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran pelayanan publik di Kecamatan Ampelgading, antara lain:*

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
- b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
- c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan uraian hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.3** berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021**  
**Kabupaten Malang**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPД				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>644.361.200,00</b>						<b>644.361.200,00</b>		
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				<b>644.361.200,00</b>						<b>644.361.200,00</b>		
4.406.70	<b>KECAMATAN AMPELGADING</b>				<b>644.361.200,00</b>						<b>644.361.200,00</b>		
4.406.70.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEKAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		<b>100%</b>	<b>179.714.272,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEKAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		<b>100%</b>	<b>179.714.272,00</b>		
4.406.70.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Ampelgading	12 kali	52.006.800,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Ampelgading	12 kali	52.006.800,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	39.254.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	39.254.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	33.386.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	33.386.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang	Kecamatan Ampelgading	1 kegiatan	12.148.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang	Kecamatan Ampelgading	1 kegiatan	12.148.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPД				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Masyarakat	Kecamatan					Masyarakat	Kecamatan					
		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	15.704.800,00	APBD Kabupaten		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	15.704.800,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	19.430.672,00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	19.430.672,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	Kecamatan Ampelgading	11 jenis	7.784.000,00	APBD Kabupaten		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	Kecamatan Ampelgading	11 jenis	7.784.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.70.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>298.295.928,00</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>298.295.928,00</b>		
4.406.70.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Ampelgading	1200 buah	6.000.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Ampelgading	1200 buah	6.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Ampelgading	12 bulan	9.000.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Ampelgading	12 bulan	9.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Ampelgading	84 ob	68.057.892,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Ampelgading	84 ob	68.057.892,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Ampelgading	12 ob	13.200.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Ampelgading	12 ob	13.200.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ampelgading	43 jenis	39.220.236,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ampelgading	43 jenis	39.220.236,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.70.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ampelgading	2 jenis	17.541.600,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ampelgading	2 jenis	17.541.600,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 jenis	3.720.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 jenis	3.720.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Ampelgading	3000 kotak	40.606.200,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Ampelgading	3000 kotak	40.606.200,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kecamatan Ampelgading	12 hok	12.600.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kecamatan Ampelgading	12 hok	12.600.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Ampelgading	500 hok	88.350.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Ampelgading	500 hok	88.350.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.70.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>142.913.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>142.913.000,00</b>		
4.406.70.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Ampelgading	1 unit	6.324.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Ampelgading	1 unit	6.324.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 unit	31.107.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 unit	31.107.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.70.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Ampelgading	7 unit	40.052.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Ampelgading	7 unit	40.052.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 paket	16.430.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 paket	16.430.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.03.05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Ampelgading	8 jenis	49.000.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Ampelgading	8 jenis	49.000.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.70.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.300.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.300.000,00</b>		
4.406.70.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Ampelgading	14 stel	6.650.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Ampelgading	14 stel	6.650.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Ampelgading	17 stel	7.650.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Ampelgading	17 stel	7.650.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.70.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>9.138.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>9.138.000,00</b>		
4.406.70.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan	Kecamatan Ampelgading	7 dok	5.630.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan	Kecamatan Ampelgading	7 dok	5.630.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kinerja SKPD	Masyarakat) (Buku)					Kinerja SKPD	Masyarakat) (Buku)					
4.406.70.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Ampelgading	2 lap	180.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Ampelgading	2 lap	180.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.70.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Ampelgading	4 lap	3.328.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Ampelgading	4 lap	3.328.000,00	APBD Kabupaten	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ampelgading sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2021. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4:

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Ampelgading sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat yang meliputi 11 (sebelas) jenis perijinan yaitu:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal;
2. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Skala Usaha Kecil;
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
5. Izin Tempat Parkir Insidentil;
6. Izin Reklame Insidentil;
7. Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian;
8. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
9. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
10. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak;
11. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat.

Kecamatan Ampelgading juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif

Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender. Kegiatan responsif gender di Kecamatan Ampelgading yaitu kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan yang diwujudkan melalui keterlibatan unsur perempuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kecamatan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 terutama misi kedua yaitu: ***“Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.”*** Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Ampelgading adalah: ***“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Ampelgading.”***

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Ampelgading dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis dalam melengkapi jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2016-2021 kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2019-2021 yaitu:

***“Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Ampelgading.”***

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2021 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 program dan 25 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h. Penyediaan makanan dan minuman;
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

#### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

#### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

#### **5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022**  
**Kecamatan Ampelgading**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				644.361.200,00				644.851.328,00
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				644.361.200,00				644.851.328,00
4.406.70	<b>KECAMATAN AMPELGADING</b>				644.361.200,00				644.851.328,00
4.406.70.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		100%	179.714.272,00			100%	179.894.000,00
4.406.70.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Ampelgading	12 kali	52.006.800,00	APBD Kabupaten		12 kali	52.059.000,00
4.406.70.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	39.254.000,00	APBD Kabupaten		12 kegiatan	39.293.000,00
4.406.70.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	33.386.000,00	APBD Kabupaten		12 kegiatan	33.419.000,00
4.406.70.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Ampelgading	1 kegiatan	12.148.000,00	APBD Kabupaten		1 kegiatan	12.160.000,00
		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	15.704.800,00	APBD Kabupaten		12 kegiatan	15.721.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.70.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	19.430.672,00	APBD Kabupaten		12 kegiatan	19.450.000,00
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	Kecamatan Ampelgading	11 jenis	7.784.000,00	APBD Kabupaten		11 jenis	7.792.000,00
<b>4.406.70.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>298.295.928,00</b>			<b>100%</b>	<b>289.431.328,00</b>
4.406.70.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Ampelgading	1200 buah	6.000.000,00	APBD Kabupaten		1200 buah	6.000.000,00
4.406.70.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Ampelgading	12 bulan	9.000.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	9.000.000,00
4.406.70.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Ampelgading	84 ob	68.057.892,00	APBD Kabupaten		84 ob	68.057.892,00
4.406.70.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Ampelgading	12 ob	13.200.000,00	APBD Kabupaten		12 ob	13.213.000,00
4.406.70.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ampelgading	43 jenis	39.220.236,00	APBD Kabupaten		43 jenis	33.220.236,00
4.406.70.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ampelgading	2 jenis	17.541.600,00	APBD Kabupaten		2 jenis	17.559.000,00
4.406.70.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 jenis	3.720.000,00	APBD Kabupaten		1 jenis	3.724.000,00
4.406.70.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Ampelgading	3000 kotak	40.606.200,00	APBD Kabupaten		3000 kotak	37.606.200,00
4.406.70.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kecamatan Ampelgading	12 hok	12.600.000,00	APBD Kabupaten		12 hok	12.613.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.70.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Ampelgading	500 hok	88.350.000,00	APBD Kabupaten		500 hok	88.438.000,00
<b>4.406.70.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>142.913.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>152.064.000,00</b>
4.406.70.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Ampelgading	1 unit	6.324.000,00	APBD Kabupaten		1 unit	6.330.000,00
4.406.70.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 unit	31.107.000,00	APBD Kabupaten		1 unit	36.143.000,00
4.406.70.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Ampelgading	7 unit	40.052.000,00	APBD Kabupaten		7 unit	44.096.000,00
4.406.70.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 paket	16.430.000,00	APBD Kabupaten		1 paket	16.446.000,00
4.406.70.03.05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	Kecamatan Ampelgading	8 jenis	49.000.000,00	APBD Kabupaten		8 jenis	49.049.000,00
<b>4.406.70.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.300.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>14.315.000,00</b>
4.406.70.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Ampelgading	14 stel	6.650.000,00	APBD Kabupaten		17 stel	6.657.000,00
4.406.70.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Ampelgading	17 stel	7.650.000,00	APBD Kabupaten		17 stel	7.658.000,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.70.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		100%	9.138.000,00			100%	9.147.000,00
4.406.70.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Ampelgading	7 dok	5.630.000,00	APBD Kabupaten		7 dok	5.636.000,00
4.406.70.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Ampelgading	2 lap	180.000,00	APBD Kabupaten		2 lap	180.000,00
4.406.70.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Ampelgading	4 lap	3.328.000,00	APBD Kabupaten		4 lap	3.331.000,00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang sebagaimana diuraikan pada tabel 4.1, serta Rencana Kerja dan Rencana Penyerapan Anggaran per Triwulan (%) Kecamatan Ampelgading tahun 2021 di uraikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Ampelgading Tahun 2021**

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>644.361.200,00</b>		
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				<b>644.361.200,00</b>		
	<b>KECAMATAN AMPELGADING</b>				<b>644.361.200,00</b>		
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		<b>100%</b>	<b>179.714.272,00</b>		
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Ampelgading	12 kali	52.006.800,00	APBD Kabupaten	
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	39.254.000,00	APBD Kabupaten	
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	33.386.000,00	APBD Kabupaten	
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Ampelgading	1 kegiatan	12.148.000,00	APBD Kabupaten	
		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	15.704.800,00	APBD Kabupaten	
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Ampelgading	12 kegiatan	19.430.672,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	Kecamatan Ampelgading	11 jenis	7.784.000,00	APBD Kabupaten	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>298.295.928,00</b>		

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Ampelgading	1200 buah	6.000.000,00	APBD Kabupaten	
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Ampelgading	12 bulan	9.000.000,00	APBD Kabupaten	
8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Ampelgading	84 ob	68.057.892,00	APBD Kabupaten	
9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Ampelgading	12 ob	13.200.000,00	APBD Kabupaten	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ampelgading	43 jenis	39.220.236,00	APBD Kabupaten	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ampelgading	2 jenis	17.541.600,00	APBD Kabupaten	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 jenis	3.720.000,00	APBD Kabupaten	
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Ampelgading	3000 kotak	40.606.200,00	APBD Kabupaten	
14	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kecamatan Ampelgading	12 hok	12.600.000,00	APBD Kabupaten	
15	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Ampelgading	500 hok	88.350.000,00	APBD Kabupaten	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>142.913.000,00</b>		
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Ampelgading	1 unit	6.324.000,00	APBD Kabupaten	

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 unit	31.107.000,00	APBD Kabupaten	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Ampelgading	7 unit	40.052.000,00	APBD Kabupaten	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ampelgading	1 paket	16.430.000,00	APBD Kabupaten	
20	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	Kecamatan Ampelgading	8 jenis	49.000.000,00	APBD Kabupaten	
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.300.000,00</b>		
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Ampelgading	14 stel	6.650.000,00	APBD Kabupaten	
22	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Ampelgading	17 stel	7.650.000,00	APBD Kabupaten	
V	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>9.138.000,00</b>		
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Ampelgading	7 dok	5.630.000,00	APBD Kabupaten	
24	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Ampelgading	2 lap	180.000,00	APBD Kabupaten	
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Ampelgading	4 lap	3.328.000,00	APBD Kabupaten	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)								KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	I		II		III		IV		
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	11 jenis	7.784.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
<b>4.406.70.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>298.295.928,00</b>	<b>25,1</b>	<b>24,9</b>	<b>22,45</b>	<b>22,3</b>	<b>25,7</b>	<b>26,35</b>	<b>26,75</b>	<b>26,45</b>	
4.406.70.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1200 buah	6.000.000,00	25	24,99	25	24,99	25	25	25	25,02	
4.406.70.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	9.000.000,00	25	24,99	25	24,99	25	25	25	25,02	
4.406.70.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	84 ob	68.057.892,00	25	24,99	25	24,99	25	25	25	25,02	
4.406.70.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	13.200.000,00	25	24,99	25	24,99	25	25	25	25,02	
4.406.70.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	43 jenis	39.220.236,00	24	24	24	24	26	26	26	26	
4.406.70.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	17.541.600,00	26	26	24	24	24	24	26	26	
4.406.70.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	3.720.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
4.406.70.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3000 kotak	40.606.200,00	27	27	17	17	30	30	26	26	
4.406.70.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 hok	12.600.000,00	25	25	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	
4.406.70.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	500 hok	88.350.000,00	24	24	22	22	27	27	27	27	
<b>4.406.70.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>142.913.000,00</b>	<b>17,5</b>	<b>13,71</b>	<b>25</b>	<b>16,43</b>	<b>30</b>	<b>33,57</b>	<b>27,5</b>	<b>36,29</b>	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)								KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I		II		III		IV		
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.70.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	6.324.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
4.406.70.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 unit	31.107.000,00	12,5	12,5	25	25	25	25	37,5	37,5	
4.406.70.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	40.052.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
4.406.70.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 paket	16.430.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
4.406.70.03.05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	8 jenis	49.000.000,00	0	0	0	0	50	50	50	50	
<b>4.406.70.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>26,75</b>	<b>75</b>	<b>73,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.406.70.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	14 stel	6.650.000,00	0	0	0	0	100	100	0	0	
4.406.70.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	17 stel	7.650.000,00	0	0	50	50	50	50	0	0	
<b>4.406.70.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9.138.000,00</b>	<b>10</b>	<b>18,48</b>	<b>48,34</b>	<b>29,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,66</b>	<b>51,82</b>	
4.406.70.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 dok	5.630.000,00	30	30	45	45	0	0	25	25	
4.406.70.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 lap	180.000,00	0	0	100	100	0	0	0	0	
4.406.70.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 lap	3.328.000,00	0	0	0	0	0	0	100	100	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2021, Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading ini terdapat 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2021, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2021 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

## LAMPIRAN

### 1. INDIKATOR KINERJA

<b>Tujuan / Sasaran / Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Formula</b>
<p><b>Tujuan :</b> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik</p>	<p>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ampelgading</p>	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
<p><b>Sasaran :</b> Meningkatkan kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan</p>	<p>Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam</p>	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$
<p><b>Program :</b> Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</p>	<p>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Ampelgading</p>	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$

## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab dibanding Jumlah Usulan dalam musrenbangcam X 100%	80%	94%	-	-	-
2	Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Jumlah usulan KTP / KK / dan Mutasi yang terlayani dibanding jumlah usulan yang diterima X 1100%	100%	100%	-	-	-
3	Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling	Jumlah Siskamling aktif dibanding jumlah keseluruhan Siskamling X 100 %	96%	99%	-	-	-
4	Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Kecamatan Ampelgading	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Penimbang}} \times \text{Nilai Total unsur yang diisi}$	-	-	80,5	80,5	80,5
5	Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$	-	-	80%	83%	85%